



WACANA PERPANJANGAN PPKM DARURAT Dewan Desak Pemda Ada Mitigasi Anggaran

YOGYA (KR) - Pemerintah Pusat telah memberi sinyal akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli. Salah satu alasannya karena masih tingginya kasus terkonfirmasi Covid-19.

Wacana ini tidak luput dari perhatian wakil rakyat yang duduk di DPRD DIY. Pasalnya, banyak masyarakat kecil yang terdampak dan semakin terhimpit. Untuk itu Pemerintah Daerah (Pemda) harus berpikir serius untuk memperhitungkan betul-betul jika memang PPKM darurat mau diperpanjang. "Hal pertama yang harus diperhatikan, pastikan jika PPKM darurat berjalan baik dan sesuai dengan instruksi pusat. Termasuk harus ada skema percepatan penanggulangan dampak PPKM. Terutama di bidang sosial ekonomi," kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Arif Setiadi, Minggu (18/7).

Arif menambahkan, saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan. Sementara pengeluaran rutin tetap berjalan. Untuk itu, mitigasi terkait wacana perpanjangan PPKM darurat harus ada. "Pemda harus segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Terutama dalam pemanfaatan dana keistimewaan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, pendataan warga terdampak juga harus segera dilakukan. Tidak terbatas yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saja. Namun harus memperhatikan kondisi reguler yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Senada diungkapkan Gimmy Rusdin selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY. Menurutnya, pelaksanaan PPKM Darurat perlu dievaluasi lebih detail. Apalagi jika nanti PPKM Darurat benar-benar akan diperpanjang. Terutama memperhatikan kondisi masyarakat yang paling terdampak.

(Awh/Bro)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005